

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KECAMATAN BAITUSSALAM

Ade Rifki

NPP. 29.0002

*Asdaf Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: adetambunan14@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The rights and obligations of a sub-district head have been regulated in the rules regulated by each region, Baitussalam District itself already has rules as a direction in carrying out government activities in the sub-district line, namely Perbup Aceh Besar Number 34 of 2017 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Subdistrict. The sub-district carries out the government authority devolved by the Regent to handle some of the affairs of regional autonomy, including aspects of: licensing, recommendations, coordination, guidance, supervision, facilitation, determination, and implementation. **Purpose:** This research is to find out how the implementation of the Perbup Aceh Besar policy Number 34 of 2017 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Subdistrict. This study used **Methods:** : This research uses a qualitative research design with descriptive methods and inductive approaches. Data collected through interview, observation and documentation techniques. The data analysis techniques used consist of data reduction, data presentation and drawing conclusions **Results/Findings:** It shows that the implementation of the Perbup Aceh Besar policy Number 34 of 2017 in Baitussalam District has generally been done quite well. There are influencing factors including resources, dispositions or attitudes of implementers, and bureaucratic structures **Conclusion:** : It can be concluded that the implementation of the Aceh Besar Perbup policy Number 34 of 2017 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Subdistrict has been carried out quite well. This is seen from the indicators of communication that have been carried out repeatedly and regularly in every government activity in terms of realizing the implementation of the Aceh Besar Perbup policy Number 34 of 2017, but the existence of an informal communication system between the Regional Government and the Sub-district due to the large distance of the Aceh Besar government area does not rule out the possibility of misunderstandings between the local government and the sub-district apparatus.

Keywords: Implementation, Policy, delegation of authority.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hak dan kewajiban seorang Camat telah diatur dalam aturan yang diatur masing-masing daerah, Kecamatan Baitussalam sendiri telah memiliki aturan sebagai arah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di lini kecamatan yaitu Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.. **Tujuan:** penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi

kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Penelitian ini menggunakan **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Menunjukkan pelaksanaan kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 di Kecamatan Baitussalam umumnya telah dilakukan dengan cukup baik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan telah dijalankan dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat daripada indikator komunikasi yang telah dilakukan secara berulang dan rutin dalam setiap kegiatan pemerintah dalam hal mewujudkan implementasi yang baik pada kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017, namun adanya sistem komunikasi tidak formal antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan akibat jarak wilayah pemerintahan Aceh Besar yang luas tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pihak pemda dan aparatur kecamatan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, pendelegasian wewenang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi dari Orde Baru ke era Reformasi menyebabkan banyak perubahan di Indonesia. Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan yang awalnya sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Pelaksanaan Otonomi Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pengelolaan suatu daerah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan aspek koneksi dari susunan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan Otonomi Daerah diberikan dengan tujuan agar daerah dapat menjadi mandiri dalam hal mengurus rumah tangganya masing-masing dengan mengutamakan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah Aceh diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyatakan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk daerah saat melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan suara dan kondisi masyarakat serta keunikan daerah. Peraturan daerah yang diputuskan dan dilaksanakan oleh suatu daerah hanya berlaku dalam batas wilayah hukum daerah yang melaksanakan. Namun, Peraturan daerah yang diputuskan oleh Daerah tidak boleh berlawanan sebagaimana peraturan perundang-undangan di tingkat yang di atasnya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan prinsip Desentralisasi dan Pembantuan. Kegiatan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat sebagai upaya pengimplementasian kebijakan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang tergambarkan pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017. Kebijakan ini merupakan aturan dasar dalam menjalankan tugas atas dasar beban pendelegasian wewenang Bupati Aceh Besar kepada Camat Baitussalam. Aparatur dan Camat Baitussalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan memiliki

pemikiran dan pengetahuan yang lebih luas, serta profesional dalam melaksanakan tugas. Apalagi sekarang masyarakat khususnya Kecamatan Baitussalam sudah maju dan berilmu. Berdasarkan kemampuan yang masyarakat miliki, masyarakat menuntut pemerintah untuk memperhatikan kualitas pelayanan yang pemerintah berikan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kantor kecamatan Baitussalam dalam melaksanakan pendelegasian wewenang dari Bupati Aceh Besar dan upaya mengimplementasikan kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai aturan dasar pendelegasian wewenang di bidang pemerintahan daripada Bupati Aceh Besar kepada Camat Baitussalam harus lah memiliki kualitas yang baik dan senantiasa terus ditingkatkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat besarnya peran Kecamatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, membuat peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai aturan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan di lini Kecamatan. Serta melihat bagaimana standar kegiatan pendelegasian sebagai upaya memberikan kekuasaan dan mengatur tugas serta fungsi dalam menjalankan kegiatan Kecamatan yang dilakukan Pemda Aceh Besar kepada Kecamatan khususnya Kecamatan Baitussalam. Serta melihat belum adanya aturan berupa ketetapan standar individu dalam pendelegasian membuat peneliti dan masyarakat berspekulasi kegiatan pendelegasian yang dilakukan Pemda Aceh Besar kepada Camat Baitussalam tidak akan terhindarkan dari penyelewengan dalam bentuk nepotisme..

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi pedoman peneliti dalam pengerjaan penelitian tentang pendelegasian wewenang Camat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang berbeda. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan antara lain; penelitian yang dilakukan oleh Y. Andi Surya Putra yang berjudul Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen (Studi Otonomi Daerah di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen). Tujuan umum dari penelitian ini adalah efektifitas terkait dengan camat pada pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dalam pelaksanaan otonomi daerah. Output dari penelitian ini adalah Menjadi bahan masukan bagi camat dalam pelaksanaan pendelegasian beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, penelitian oleh Gormico, Andrew. R.Parwadi, E.I. Listiani yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Tujuan umum dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rinci dan faktual efektivitas implementasi kebijakan serta mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati Landak Kepada Camat Sengah Temila. Output dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Landak khususnya di Kecamatan Sengah Temila. Ketiga, penelitian oleh Laksana, Agung Wara. dkk yang berjudul Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini adalah Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat terselenggaranya pelimpahan urusan pemerintahan. Output dari penelitian ini adalah 4 faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana serta struktur organisasi, termasuk pengaturan alur kerja birokrasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Kebijakan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kecamatan Baitussalam yang dimana penelitian ini sendiri memiliki tujuan yang jelas dan arah pembahasan yang akan dibahas terkait implementasi kebijakan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai aturan dasar pendelegasian kewenangan di bidang pemerintahan daripada Bupati Aceh Besar kepada Camat Baitussalam. Tujuan khususnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi publik. Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Gorontalo

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Bupati Kabupaten Aceh Besar, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Camat Baitussalam, Kepala Seksi Pemerintahan dan Masyarakat Baitussalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Baitussalam.

Implementasi kebijakan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai aturan dasar pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan daripada Bupati Aceh Besar kepada Camat Baitussalam tergambar pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017. Kebijakan ini merupakan aturan dasar dalam menjalankan tugas atas dasar beban pendelegasian wewenang Bupati Aceh Besar kepada Camat Baitussalam. Kecamatan Baitussalam adalah salah satu dari 23 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dalam menjalankan roda pemerintahan di lini Kecamatan. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menjelaskan, sebagai bagian wilayah yang diatur dari Pemda Kabupaten Aceh besar, Kecamatan Baitussalam memiliki kewajiban untuk senantiasa menjalankan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Baitussalam sendiri telah menjalankan kegiatan pemerintahan di lini kecamatan sesuai dengan peraturan tersebut sejak awal Perbup tersebut disahkan. Untuk melihat jalannya roda pemerintahan di Kecamatan Baitussalam berdasarkan pengimplementasian kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, peneliti menggunakan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemda dengan Camat Baitussalam dalam menjaga terjalankannya roda pemerintahan di lini kecamatan sesuai dengan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Kecamatan telah dilakukan dan dijaga intensitas dengan baik. begitu pula dengan komunikasi yang terjalin dengan masyarakat, dimana berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang pernah menerima pelayanan langsung dari kantor camat Baitussalam merasa puas dan sudah terlayani dengan baik. hal ini mencerminkan Kecamatan Baitussalam sudah melakukan segala standar pelayanan yang ditetapkan pada Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. seluruh hal menyangkut terjalinnya komunikasi dalam mengimplementasikan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 sudah dilakukan dengan baik dan hal ini dilakukan tentu untuk menjaga kualitas kinerja dan menjaga arah berjalannya roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar seluruh tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai.

3.1.2 Sumber Daya

Hasil penelitian menggambarkan bahwasanya pemenuhan sumber daya manusia khususnya pimpinan di lini kecamatan (Camat) yang bertugas di Kabupaten Aceh Besar memiliki standar pendidikan yang telah diatur dan Pemda memiliki komitmen untuk senantiasa memenuhi SDM sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan lingkungan pada setiap Kecamatan di lingkup Pemda Aceh Besar. Pemenuhan sumber daya berbentuk materil lainnya juga digambarkan dari sumber Laporan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Baitussalam yang disusun oleh Kecamatan Baitussalam setiap tahunnya. Pada Laporan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Baitussalam menggambarkan besaran dana Pemda yang diterima oleh Kecamatan Baitussalam untuk menjalankan roda pemerintahan di lini kecamatan. Dana yang diterima per tahunnya dari tahun 2018-2022 rata-rata senilai Rp.604.100.000. Dana tersebut biasanya digunakan untuk keperluan keperluan pendanaan kegiatan pelayanan dalam bentuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan pada Tingkat Kecamatan dan Program Pembinaan Syariat Islam.

3.1.3 Disposisi

Hasil penelitian dengan berbagai informan baik berasal dari internal dan eksternal pemerintah, dapat disimpulkan sikap dan komitmen pelaksana dari kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sudah sangat baik. Bermula dari Pemda yang senantiasa berkomitmen menjaga kualitas individu yang menduduki jabatan Camat sesuai dengan peraturan perundanganundangan, menjaga komunikasi dengan semua lini Kecamatan salah satunya Kecamatan Baitussalam, selanjutnya sikap camat yang mencerminkan kepemimpinan yang tegas, disiplin dan peduli terhadap masyarakat, serta dampak perkembangan pelayanan yang telah dirasakan oleh masyarakat dimana pelayanan Kecamatan Baitussalam dirasa terus menerus mengalami perkembangan kearah yang lebih baik.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menggambarkan adanya standar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Baitussalam. Tugas dan fungsi telah dilakukan selama bertahun-tahun berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang bersih, efektif, efisien, dan bersifat taat kepada hukum yang berlaku.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adapun beberapa persamaan yang terletak antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian pada rumpun ilmu sosial dengan object yang diteliti ialah lini pemerintah di tingkat Kecamatan. Serta sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah terkait pada lokasi, waktu, kajian Pustaka yang digunakan, individu-individu yang akan menjadi informan dan metodologi yang digunakan. Lokasi penelitian, akan dilakukan di kantor Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang memiliki kultur budaya serta aturan berbeda dengan lokasi-lokasi pada penelitian terdahulu. Waktu penelitian sendiri juga merupakan waktu sekarang (terbaru) dan dipastikan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan merupakan hal baru dari yang sebelumnya telah menjadi output pada penelitian sebelumnya. Kajian pustaka sendiri, pada penelitian ini peneliti meneliti kepustakaan dari pada suatu kebijakan yaitu Perbup Aceh Besar Nomor 34 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai aturan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan di lini Kecamatan. Dimana, kebijakan tersebut hanya memiliki keberlakuan pada daerah Aceh Besar. Serta peneliti menggunakan kajian Pustaka berupa teroi yang akan menjadi arah dalam melakukan penelitian yaitu teori yang dikembangkan George Edward III (1980: 10-20) dalam buku Sahya Anggara mengenai factor-faktor pendukung kritis dalam melihat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Perbedaan dalam hal informan juga tentu menjadi keunggulan dalam penelitian ini, dimana partisipan yang menjadi informan berasal dari daerah yang diberlakukannya kebijakan yang akan diteliti penerapannya, sehingga dengan factor lingkungan, sosial dan budaya yang berbeda maka akan menghasilkan pandangan dan informasi yang berbeda dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Terakhir, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan adanya perbedaan dalam hal penyajian data dan pengolahan dalam hal pembahasan. Berdasarkan seluruh perbedaan diatas, dapat dipastikan penelitian akan menghasilkan output, saran serta kegunaan yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan telah dijalankan dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat daripada indikator komunikasi yang telah dilakukan secara berulang dan rutin dalam setiap kegiatan pemerintah dalam hal mewujudkan implementasi yang bai pada kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017, namun adanya sistem komunikasi tidak formal antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan akibat jarak wilayah pemerintahan Aceh Besar yang luas tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pihak pemda dan aparatur kecamatan. Indikator sumber daya baik Sumber daya manusia maupun materil telah memenuhi untuk dapat mengimplementasi kebijakan ini, dilihat dari kecukupan dalam hal pemenuhan fasilitas kantor maupun individu disetiap bagian dalam kantor kecamatan yang sudah memadai, sehingga dengan pemenuhan indicator sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 telah menjadi factor yang terpenuhi dengan baik. Disposisi atau sikap pelaksana yang telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pengimplementasian kebijakan ini, dimana Camat serta setiap aparatur mendapat tanggapan dari masyarakat sebagai figure yang telah memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas dan seluruh kegiatan di lini pemerintahan kecamatan, sehingga variabel ini telah dilihat

eksistensinya dalam kegiatan pemerintahan di lini kecamatan sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017. Indikator terakhir, yaitu struktur birokrasi juga telah berjalan dengan baik dilihat dari kejelasan pembagian tugas antar pelaksana, standar pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dalam pengimplementasian kebijakan ini. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan struktur birokrasi sangat berhubungan dengan figure pemimpin yang mengatur serta mengarahkan seluruh kegiatan di lini kecamatan. Sehingga, penulis juga mengambil melihat bagaimana seorang Camat di delegasikan untuk dapat memenuhi struktur birokrasi pada lini kecamatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian untuk mampu memberi evaluasi pada lokasi serupa berkaitan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kecamatan Baitusallam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Aceh Besar Kecamatan Bitussalam beserta jajaran pegawai dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar

Y. Andi Surya Putra Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen (Studi Otonomi Daerah di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Gormico, Andrew. R.Parwadi, E.I. Listiani Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Laksana, Agung Wara. dkk Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah